

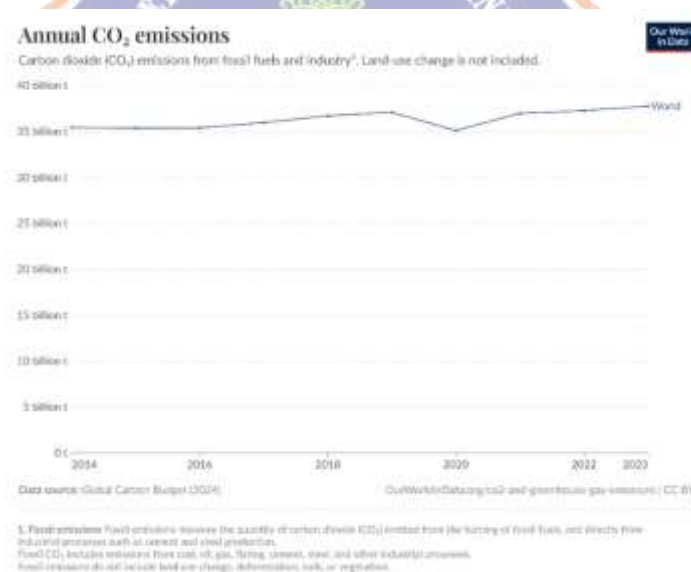
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemampuan yang berorientasi pada lingkungan berasal dari pemanfaatan sumber daya dan kompetensi perusahaan untuk membangun identitas organisasi yang ramah lingkungan dan keunggulan strategis kompetitif melalui inovasi hijau (Werastuti dkk, 2023). Ekonomi hijau didasarkan pada pengetahuan ekonomi ekologis, yang membahas ketergantungan ekonomi manusia pada ekosistem alam dan efek aktivitas ekonomi manusia terhadap perubahan iklim dan pemanasan global (Purnamawati & Adnyani, 2024). Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) saat ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian profitabilitas semata, melainkan juga dituntut untuk menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasionalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan perusahaan untuk menyusun dan menyampaikan laporan keberlanjutan. Pengungkapan informasi yang memuat aspek keuangan dan non-keuangan dalam laporan perusahaan berperan penting dalam memberikan gambaran kinerja perusahaan secara menyeluruh kepada para pemangku kepentingan. Informasi tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban perusahaan sekaligus sarana untuk memenuhi kebutuhan informasi investor (Purnamawati & Dautrey, 2025). Melalui aturan ini lembaga jasa keuangan

diwajibkan untuk secara bertahap menyusun laporan keberlanjutan mulai periode pelaporan tahun 2019 (Werastuti dkk, 2021). Kewajiban ini mendorong perusahaan untuk mengungkapkan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, termasuk upaya pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, serta konservasi energi dan sumber daya alam. Dengan demikian, perusahaan yang *go public* di Indonesia diharapkan tidak hanya bertanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham, tetapi juga terhadap keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial di sekitarnya. Menciptakan kondisi ekonomi yang adil, meningkatkan kesadaran kesehatan, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan meningkatkan pendidikan, dengan tujuan akhir untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (Purnamawati et al., 2025).



Gambar 1.1 Tren Emisi Karbon Dioksida (CO₂) Global dari Bahan Bakar Fosil dan Industri Tahun 2013–2023

Sumber: (*Our World in Data*, 2024)

Berdasarkan laporan *Global Carbon Budget 2024* yang dirilis oleh *Our World in Data* (2024), emisi karbon dioksida (CO₂) dari pembakaran bahan bakar fosil dan aktivitas industri global terus mengalami peningkatan dalam satu dekade

terakhir. Pada tahun 2023, total emisi karbon global tercatat mendekati 37 miliar ton CO₂, bahkan berada di atas level sebelum pandemi COVID-19. Grafik tren emisi CO₂ dari tahun 2014 hingga 2023 menunjukkan bahwa meskipun terdapat sedikit penurunan pada awal 2020 akibat pembatasan aktivitas global, jumlah emisi kembali meningkat tajam di tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi pencapaian target pengendalian perubahan iklim dunia, termasuk komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

Isu lingkungan merupakan salah satu permasalahan global yang terus menjadi perhatian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu isu utama yang saat ini banyak dibahas adalah emisi karbon (CO₂), yaitu gas hasil pembakaran bahan bakar fosil yang dilepaskan ke atmosfer dan berkontribusi terhadap pemanasan global serta perubahan iklim. Di Indonesia, emisi karbon mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan industri, transportasi, dan kebutuhan energi yang sebagian besar masih bergantung pada sumber energi fosil seperti batubara, minyak bumi, dan gas alam.

Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar, diikuti sektor industri, transportasi, dan limbah. Selain aktivitas industri dan energi, faktor lain yang memperburuk kondisi ini adalah alih fungsi lahan dan deforestasi, yang menyebabkan berkurangnya kemampuan lingkungan dalam menyerap karbon. Dampak dari peningkatan emisi karbon ini mulai dirasakan dalam bentuk perubahan pola cuaca ekstrem, penurunan kualitas udara, serta gangguan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian emisi karbon menjadi prioritas dalam agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Pendekatan berkelanjutan sangat erat kaitannya dengan keseimbangan proses yang terjadi di alam, baik antara manusia dengan alam sekitarnya maupun dengan hubungan sosial, budaya, dan lingkungan yang dapat dinikmati oleh generasi mendatang (Purnamawati & Hatane, 2024). Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap isu perubahan iklim, emisi karbon di Indonesia masih menjadi perhatian serius. Meskipun beberapa negara mulai menunjukkan tren penurunan emisi, Indonesia justru termasuk ke dalam daftar negara dengan kontribusi emisi karbon yang masih tinggi. Berdasarkan analisis yang dirilis oleh *Carbon Brief* (2024), Indonesia tercatat sebagai negara dengan peningkatan emisi karbon terbesar keenam di dunia selama tahun 2023. Sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Tiongkok berupaya menurunkan laju emisinya, Indonesia masih mengalami lonjakan emisi akibat tingginya konsumsi bahan bakar fosil, khususnya dari sektor energi dan transportasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian emisi karbon di Indonesia belum berjalan optimal, ditambah lagi dengan ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan masifnya pembangunan proyek energi berbasis fosil. Keberlanjutan ekonomi adalah perkembangan yang memastikan efisiensi ekonomi tercapai dan sumber daya dikelola sedemikian rupa untuk mendukung generasi mendatang (Purnamawati & Hatane, 2024). Fakta ini memperkuat urgensi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya di sektor transportasi dan logistik, untuk lebih aktif dalam mengungkapkan emisi karbon dan komitmen mitigasinya melalui laporan keberlanjutan perusahaan.

Sektor Penyumbang Emisi Karbon Terbesar di Indonesia 2024

Source: databoks



Gambar 1.2 Emisi Karbon Berdasarkan Sektor di Indonesia

Sumber : (databoks, 2024)

Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa sektor Industri Pengolahan menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia pada tahun 2024, yakni sebesar 340,71 juta ton CO₂. Di posisi kedua, terdapat sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan jumlah emisi sebesar 297,22 juta ton CO₂. Sementara itu, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 86,5 juta ton CO₂, diikuti oleh sektor Transportasi sebesar 81,08 juta ton CO₂. Adapun sektor-sektor lainnya, seperti Pengelolaan Air/Limbah, Pertambangan/Penggalian, dan Sektor Lainnya, menyumbang emisi karbon masing-masing sebesar 30,84 juta ton CO₂, 29,28 juta ton CO₂, dan 21,6 juta ton CO₂. Berdasarkan data Databoks (2024), sektor transportasi berada di peringkat keempat penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia dengan total 81,08 juta ton CO₂, setelah industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, serta sektor pertanian/hutan/perikanan. Meskipun

kontribusinya tidak sebesar industri pengolahan (340,71 juta ton CO₂), sektor transportasi memiliki karakteristik unik karena emisi yang dihasilkan langsung berasal dari aktivitas operasional sehari-hari seperti pergerakan kendaraan dan distribusi barang. Selain itu, sektor industri pengolahan telah menjadi fokus utama banyak penelitian terdahulu terkait pengungkapan emisi karbon, sehingga literatur di bidang tersebut relatif lebih lengkap. Sebaliknya, sektor transportasi dan logistik masih memiliki tingkat pengungkapan yang rendah, padahal sektor ini sangat relevan dengan target Net Zero Emission 2060 dan diatur dalam kebijakan nasional seperti POJK No.51/POJK.03/2017. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan pada sektor transportasi dan logistik untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dan memberikan kontribusi empiris yang belum banyak dibahas di literatur.

Data pada gambar menunjukkan bahwa sektor transportasi menempati peringkat keempat sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di Indonesia, yang secara langsung memperkuat urgensi penelitian terkait pengungkapan emisi karbon pada perusahaan-perusahaan transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Masalah lingkungan di Indonesia merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan mengingat dampak pengelolaan lingkungan yang buruk (Purnamawati et al., 2018). Mengingat peran signifikan sektor ini dalam menyumbang emisi karbon nasional, maka penting bagi perusahaan transportasi untuk lebih disiplin dalam mengungkapkan informasi terkait emisi karbon serta upaya mitigasinya, agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia karena berperan sebagai penghubung antar wilayah, mobilitas manusia, dan distribusi barang. Namun, di balik kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, sektor ini juga menjadi penyumbang emisi karbon yang cukup signifikan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2023), emisi karbon dari sektor transportasi mencapai sekitar 79.188 Gg CO_{2e}, atau setara 11,4% dari total emisi nasional.

Emisi sebagian besar dihasilkan dari pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor yang masih didominasi bahan bakar fosil. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada perusahaan transportasi karena sektor ini memiliki peran langsung terhadap produksi emisi karbon, namun masih minim dalam hal pengungkapan emisi karbon secara transparan dalam laporan keberlanjutan atau laporan tahunan mereka. Padahal, seiring meningkatnya kesadaran lingkungan, keterbukaan informasi terkait emisi karbon menjadi salah satu indikator penting bagi investor dan pemangku kepentingan dalam menilai komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Dengan meneliti perusahaan transportasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana perusahaan di sektor ini melaksanakan pengungkapan emisi karbon, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengungkapan tersebut.



Gambar 1.3 Perkembangan dan Proyeksi PDB Sektor Transportasi dan Pergudangan 2021-2024

Sumber: (Supply Chain Indonesia, 2023)

Pesatnya pertumbuhan aktivitas transportasi dan logistik di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir turut berkontribusi terhadap peningkatan emisi karbon nasional. Berdasarkan data dari Supply Chain Indonesia (2023), Produk Domestik Bruto (PDB) sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren kenaikan signifikan dari Rp 719,63 triliun pada tahun 2021 menjadi proyeksi Rp 1.436,12 triliun pada akhir tahun 2024, dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai 14,16 persen. Peningkatan ini mencerminkan melonjaknya aktivitas distribusi barang, layanan angkutan, dan pergerakan logistik nasional yang secara langsung menghasilkan emisi karbon dari pembakaran bahan bakar fosil, baik di moda darat, laut, maupun udara. Namun, di tengah peningkatan emisi yang ditimbulkan, pengungkapan informasi emisi karbon dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan perusahaan sektor transportasi dan logistik di Indonesia masih sangat terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penelitian pengungkapan emisi, mengingat perusahaan-perusahaan di sektor ini memiliki peran strategis dalam mendukung komitmen Indonesia untuk

menurunkan emisi karbon nasional sesuai target *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perusahaan transportasi dan logistik di Indonesia agar lebih transparan dalam mengungkapkan data emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas operasionalnya.

Penelitian ini menggunakan Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*) sebagai landasan teori utama. Teori Legitimasi menyatakan bahwa suatu organisasi atau perusahaan berusaha memastikan bahwa operasionalnya berada dalam batas-batas dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perusahaan membutuhkan legitimasi dari masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, salah satunya melalui praktik pengungkapan informasi lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon. Dalam konteks ini, pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu cara perusahaan menunjukkan kepedulian dan tanggung jawabnya terhadap isu lingkungan global, sekaligus memperoleh kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Corporate governance (CG) merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, etika bisnis, serta bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan. Menurut Kusuma & Nuswantara (2021), indikator CG dalam penelitian ini difokuskan pada jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris, karena dewan komisaris independen dinilai dapat mengawasi manajemen perusahaan secara objektif dan berperan dalam mendorong praktik bisnis berkelanjutan, termasuk pengungkapan emisi karbon. CG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka

panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global (Purnamawati dkk, 2017). Berdasarkan Teori Legitimasi, semakin kuat penerapan CG dalam perusahaan, khususnya melalui keberadaan komisaris independen, maka perusahaan cenderung lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi lingkungan untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam. Trimuliani & Febrianto (2023) menyatakan bahwa CG berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, Muliani et al. (2019) menemukan bahwa CG tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan informasi lingkungan.

Media exposure adalah tingkat keterpaparan perusahaan terhadap publik melalui media massa, baik media cetak maupun daring. Semakin sering perusahaan diberitakan oleh media, maka semakin besar peluang perusahaan untuk terpantau publik, sehingga perusahaan akan terdorong untuk melakukan pengungkapan informasi lingkungan guna menjaga citra positif. *Media exposure* memiliki peran yang sangat vital bagi reputasi dan nilai perusahaan karena media selalu mengawasi kegiatan perusahaan (Yasa & Purnamawati, 2024). Indikator pengukuran *media exposure* dalam penelitian ini menggunakan jumlah pemberitaan perusahaan di media selama periode laporan tahunan. Mengacu pada Teori Legitimasi, perusahaan yang memperoleh banyak perhatian media akan lebih berupaya memperoleh legitimasi dari masyarakat melalui pengungkapan informasi keberlanjutan, termasuk data emisi karbon. Penelitian Hardianti & Mulyani (2023) menyatakan bahwa *media exposure* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian Saputri et al. (2023)

justru menemukan hasil yang berlawanan, di mana *media exposure* tidak selalu mendorong perusahaan melakukan pengungkapan lingkungan secara optimal.

Biaya Lingkungan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait upaya pencegahan, perbaikan, dan pengendalian dampak lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan operasionalnya. Biaya lingkungan ini timbul dari aspek keuangan dan non-keuangan dari kegiatan perusahaan yang mempengaruhi kualitas lingkungan (Werastuti dkk, 2023). Menurut Pasaribu et al. (2023), biaya lingkungan dapat diukur melalui rasio biaya CSR lingkungan terhadap laba bersih perusahaan. Dalam konteks Teori Legitimasi, perusahaan yang mengeluarkan biaya lingkungan lebih besar diasumsikan memiliki komitmen lebih tinggi terhadap kelestarian lingkungan, sehingga diharapkan lebih aktif dalam mengungkapkan informasi lingkungan termasuk emisi karbon untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat. Penelitian Databoks (2024) menemukan adanya pengaruh positif antara biaya lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian lain seperti Hidayat et al. (2023) menyatakan bahwa biaya lingkungan justru memiliki dampak negatif terhadap nilai perusahaan karena dianggap sebagai pengeluaran tambahan yang tidak memberikan manfaat ekonomis langsung.

Penelitian ini memiliki keterbaruan dibandingkan studi sebelumnya karena secara khusus meneliti pengaruh *corporate governance*, *media exposure*, dan biaya lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon di sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021–2024, di mana pada periode tersebut perusahaan mulai diwajibkan menerapkan laporan keberlanjutan sesuai POJK No. 51/POJK.03/2017. Selain itu, penelitian ini juga

melakukan pengujian secara parsial untuk mengetahui variabel independen mana yang paling dominan memengaruhi pengungkapan emisi karbon, yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Keunikan lain adalah penelitian ini menggunakan sektor transportasi yang memiliki sumbangan emisi karbon cukup tinggi di Indonesia namun minim dalam aspek pengungkapan lingkungan.

Keterbaruan penelitian dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini secara khusus mengkaji pengaruh *corporate governance* (CG), *media exposure*, dan biaya lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sebelumnya, sebagian besar penelitian di Indonesia lebih banyak difokuskan pada sektor manufaktur, pertambangan, atau perusahaan publik secara umum, sementara sektor transportasi dan logistik yang secara langsung menyumbang emisi karbon dalam jumlah besar justru masih minim mendapat perhatian dalam konteks pengungkapan lingkungan.

Kedua, penelitian ini dilakukan pada periode 2021–2024, bertepatan dengan mulai diberlakukannya kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan bagi perusahaan terbuka di Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017. Periode ini menjadi momen penting karena perusahaan dituntut semakin transparan dalam menyampaikan informasi lingkungan, termasuk data emisi karbon dan upaya mitigasinya, untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan dan persyaratan regulasi.

Ketiga, penelitian ini menggunakan kombinasi variabel yang relatif jarang dikaji secara bersamaan dalam penelitian terdahulu di Indonesia. Penggunaan variabel *corporate governance*, *media exposure*, dan biaya lingkungan sebagai

determinan pengungkapan emisi karbon dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi perusahaan dalam menyampaikan informasi lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga menguji secara parsial pengaruh masing-masing variabel independen untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan memengaruhi tingkat pengungkapan emisi karbon di sektor ini.

Dengan adanya keterbaruan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis dalam pengembangan akuntansi keberlanjutan berbasis Teori Legitimasi, maupun secara praktis bagi perusahaan, investor, dan regulator dalam meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan di sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Selain sebagai pemenuhan regulasi POJK No. 51/2017, pengungkapan emisi karbon juga menjadi indikator penting dalam menilai kesiapan perusahaan menghadapi target penurunan emisi nasional. Indonesia melalui strategi *Net Zero Emission* (NZE) berkomitmen untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060, dengan milestone penurunan emisi sektor strategis seperti transportasi dan logistik mulai diakselerasi sejak 2026. Oleh karena itu, perusahaan transportasi dituntut untuk lebih aktif dalam menyampaikan informasi emisi karbon guna memastikan akuntabilitas lingkungan serta mendukung pencapaian target NZE nasional.

Sebagai bagian dari komitmen global dalam mengatasi krisis iklim, Indonesia telah menetapkan target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060. Untuk mencapainya, pemerintah mulai mendorong percepatan transisi energi bersih, pengembangan pasar karbon, serta regulasi pelaporan emisi yang lebih ketat. Namun, tantangan terbesar terletak pada sektor-sektor penghasil emisi

tinggi, termasuk transportasi dan logistik, yang masih mendominasi penggunaan bahan bakar fosil. Oleh karena itu, keterbukaan perusahaan dalam mengungkapkan emisi karbon menjadi sangat penting sebagai langkah awal menuju perbaikan tata kelola lingkungan dan pencapaian target NZE tersebut.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon. Misalnya, *Good corporate governance* ditemukan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon oleh Trimuliani dan Febrianto (2023), namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Muliani et al. (2019) yang menyatakan bahwa GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tersebut. Demikian pula, *Media exposure* menurut penelitian Hardianti dan Mulyani (2023) berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon, tetapi Saputri et al. (2023) menemukan bahwa *media exposure* tidak memiliki pengaruh signifikan. Adapun Biaya Lingkungan, Hidayat et al. (2023) menemukan bahwa tingginya biaya lingkungan justru menurunkan tingkat pengungkapan emisi karbon karena dianggap sebagai beban tambahan bagi perusahaan. Namun beberapa studi lainnya menunjukkan bahwa biaya lingkungan menjadi bukti nyata komitmen terhadap keberlanjutan dan meningkatkan pengungkapan (Rahmawati & Prasetyo, 2022).

Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah penelitian dan inkonsistensi temuan, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pengungkapan emisi karbon, khususnya di sektor transportasi dan logistik di Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan fenomena yang terjadi, penelitian ini menduga bahwa, Semakin tinggi proporsi komisaris

independen (CG), maka semakin besar kemungkinan perusahaan mengungkapkan emisi karbon, karena tuntutan tata kelola yang transparan (Trimuliani & Febrianto, 2023). Semakin tinggi frekuensi pemberitaan media, maka semakin besar tekanan publik terhadap perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas lingkungan (Hardianti & Mulyani, 2023). Biaya lingkungan yang tinggi justru dapat menurunkan pengungkapan karena perusahaan khawatir dengan persepsi negatif terhadap efisiensi operasional mereka (Hidayat et al., 2023).

Urgensi penelitian ini adalah mendorong transparansi pengungkapan emisi karbon di sektor transportasi dan logistik yang menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap emisi karbon, namun pelaporannya belum optimal. Dengan adanya regulasi POJK No.51/POJK.03/2017 dan target *Net Zero Emission* (NZE) 2060, sektor ini didorong untuk lebih terbuka dalam menyampaikan informasi keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mendorong keterbukaan perusahaan dan menyediakan masukan bagi regulator serta investor. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini berjudul “Pengaruh *Corporate Governance*, *Media exposure*, dan Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon”. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan akuntansi keberlanjutan di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Corporate governance* (CG) dalam perusahaan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa aktivitas operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip keberlanjutan dan peraturan yang berlaku. Namun, belum semua perusahaan sektor transportasi dan logistik di Indonesia menerapkan tata kelola perusahaan yang baik secara optimal, khususnya terkait keberadaan dewan komisaris independen yang mampu mendorong pengungkapan emisi karbon. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penerapan CG berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan emisi karbon perusahaan.
2. *Media exposure* yang diterima perusahaan melalui pemberitaan media massa dapat memberikan tekanan bagi perusahaan untuk lebih transparan terhadap isu-isu lingkungan, termasuk pengungkapan emisi karbon. Namun, tingkat keterbukaan informasi tersebut masih beragam di antara perusahaan sektor transportasi dan logistik di Indonesia. Hal ini memunculkan pertanyaan apakah *media exposure* berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon perusahaan.
3. Biaya Lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan bentuk komitmen nyata perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Akan tetapi, di sektor transportasi dan logistik, masih banyak perusahaan yang minim dalam alokasi biaya lingkungan dan belum optimal dalam mengungkapkan informasi emisi karbon secara transparan. Oleh sebab itu, perlu ditelusuri apakah biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
4. Pengungkapan Emisi Karbon di sektor transportasi dan logistik di Indonesia masih tergolong rendah meskipun perusahaan-perusahaan di

sektor ini merupakan salah satu penyumbang emisi karbon terbesar. Ketidakterbukaan ini berpotensi menimbulkan citra negatif bagi perusahaan di mata investor, masyarakat, dan pemerintah, serta mempengaruhi nilai perusahaan di pasar modal.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terfokus dan tidak melebar ke luar konteks yang telah ditetapkan, maka dilakukan beberapa pembatasan masalah sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai pengaruh *Corporate Governance* (CG), *Media Exposure*, dan Biaya Lingkungan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024.
2. *Corporate governance* (CG) dalam penelitian ini diproksi dengan jumlah komisaris independen dalam dewan komisaris perusahaan.
3. *Media exposure* diukur berdasarkan jumlah pemberitaan perusahaan di media daring nasional dalam periode satu tahun laporan.
4. Biaya Lingkungan dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio total biaya lingkungan terhadap laba bersih perusahaan selama periode laporan.
5. Pengungkapan Emisi Karbon diukur menggunakan 18 item pengungkapan yang diadopsi dari Carbon Disclosure Project (CDP) dan laporan keberlanjutan perusahaan yang tersedia selama periode penelitian.
6. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan keuangan, serta publikasi pemberitaan media daring nasional periode 2021–2024.

7. Penelitian ini tidak membahas variabel lain di luar *Corporate governance*, *Media exposure*, dan Biaya lingkungan serta tidak mempertimbangkan faktor eksternal lain seperti kebijakan pemerintah secara spesifik per perusahaan, kondisi pasar modal, dan situasi makro ekonomi.

1.4 Rumusan Masalah

Dari konteks yang telah diuraikan, peneliti menetapkan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Apakah *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon?
2. Apakah *media exposure* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon?
3. Apakah biaya lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon?

1.5 Tujuan Penelitian

Dari deskripsi masalah yang telah disebutkan, peneliti menetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh *corporate governance* terhadap pengungkapan emisi karbon.
2. Menganalisis pengaruh *media exposure* terhadap pengungkapan emisi karbon.
3. Menganalisis pengaruh biaya lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi keberlanjutan dan akuntansi lingkungan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan emisi karbon, khususnya di sektor transportasi dan logistik di Indonesia, serta memperkuat penerapan Teori Legitimasi dalam konteks pengungkapan informasi lingkungan.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi perusahaan sektor transportasi dan logistik tentang pentingnya menerapkan *corporate governance*, memperhatikan *media exposure*, serta mengalokasikan biaya lingkungan dalam meningkatkan pengungkapan emisi karbon sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi perusahaan dalam menyusun strategi keberlanjutan dan laporan pengungkapan emisi karbon ke depan.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para investor dalam mempertimbangkan aspek lingkungan dan keberlanjutan, khususnya

informasi terkait pengungkapan emisi karbon perusahaan, sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan investasi.

c. Bagi Pemerintah dan Regulator

Penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan bagi pemerintah dan otoritas terkait dalam menyusun serta menyempurnakan kebijakan dan regulasi mengenai kewajiban pengungkapan informasi lingkungan, khususnya emisi karbon di sektor transportasi, yang merupakan salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia.

d. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang ingin melakukan studi lebih lanjut mengenai pengungkapan emisi karbon maupun faktor-faktor lingkungan lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk memperluas penelitian dengan variabel atau sektor industri yang berbeda.

